

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Anggana Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Anggana disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Anggana Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Anggana kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang



Camat Anggana

RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP

Pembina Tingkat I

NIP 198409222003121001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Struktur Organisasi	7
D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
E. Sumber Daya Aparatur	9
F. Sumber Daya Keuangan	11
G. Isu-Isu Strategis	11
H. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Perencanaan Kinerja	14
1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Strategi	15
4. Arah Kebijakan	16
5. Program	18
B. Perjanjian Kinerja	19
C. Alokasi Anggaran Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja	22
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	33



3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Anggana (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.	42
4	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	48
B.	Realisasi Anggaran	51
BAB IV Penutup		
A	Kesimpulan dan Saran	62
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Anggana Tahun 2025.....	6
Tabel 1.3	PNS Berdasarkan Pendidikan.....	10
Tabel 1.4	PNS Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	15
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2.3	Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	21
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2025	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025.....	24
Tabel 3.3	Analisis Hasil Survey	26
Tabel 3.4	Pendapatan Asli Desa Di wilayah Kecamatan Anggana Tahun 2025	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	33
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	34
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025.....	41
Tabel 3.8	Faktor Pendukung dan penghambat realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025	42
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja 2025	44



Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Anggana	48
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Anggana	49
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Anggana	52
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Anggana	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase luas wilayah Desa/Kecamatan	4
-------------------	--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2	Persentase Luas wilayah Desa/Kecamatan	4
-------------------	--	---



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Anggana dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Anggana Tahun 2025;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Anggana Tahun 2025; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Anggana Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anggana Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Anggana
2. Mendorong Kecamatan Anggana di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Anggana untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Anggana di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Anggana merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Anggana terletak antara 117°13' BT – 117°36' Bujur Timur dan 0°24'– 0°54' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.798,80 km².

Secara administratif, Kecamatan Anggana berbatasan dengan:



- Sebelah utara : Kec Muara Badak
Sebelah timur : Selat Makassar
Sebelah selatan : Kecamatan Sanga Sanga dan Kec.Muara Jawa
Sebelah barat : Kota Samarinda

Wilayah Kecamatan Anggana terdiri dari 8 desa, diantaranya Desa Sungai Meriam, Desa Anggana, Desa Sidomulyo, Desa Kutai Lama, Desa Handil Terusan, Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Sungai Meriam. Dari Depalan desa tersebut, 5 Desa di Darat dan 3 Desa di di wilayah Delta Mahakam yang berupa kepulauan Desa Sepatin merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 79 kilometer, sedangkan Desa Tani Baru berjarak 61 kilometer. Desa Muara Pantuan 41 Km Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Anggana dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalan sungai dan laut.

Seluruh desa di Kecamatan Anggana terletak pada bantaran sungai. Salah satu sungai besar yang ada di Kecamatan Anggana, yaitu Sungai Mahakam yang terbentang dari muara selat makasar sampai ke wilayah Samarinda

Berdasar letak geografisnya, Iklim Kecamatan Anggana beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan per bulannya 386 mm dan selama 17 hari per bulan Mei di tahun 2025.

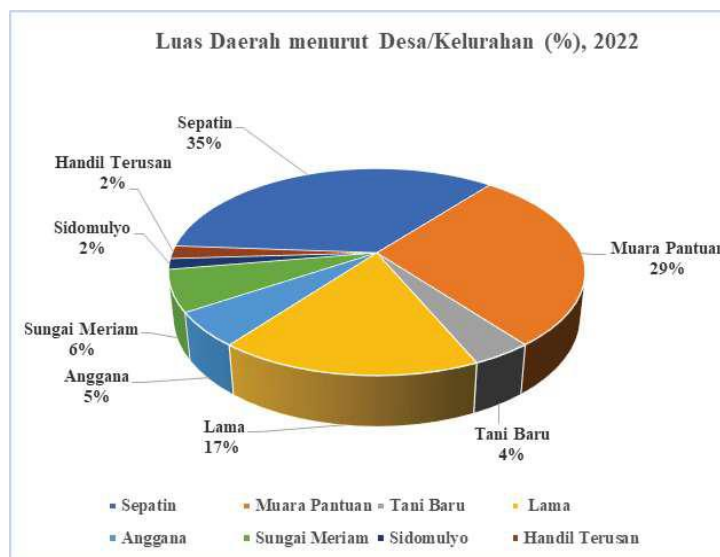
(sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2025)

Gambar 1.1 Persentase wilayah Desa /Kecamatan Anggana



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan Anggana sebagai berikut:

Grafik 1.2 Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana





Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Anggana

Desa/Kelurahan		Luas (km ²)	Persentase (%)	Keterangan
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Sepatin	624,87	34,74	Desa
2.	Muara Pantuan	513,32	28,53	Desa
3.	Tani Baru	71,50	3,97	Desa
4.	Kutai Lama	308,95	17,18	Desa
5.	Anggana	97,12	5,40	Desa
6.	Sungai Meriam	116,54	6,48	Desa
7.	Sidomulyo	30,00	1,67	Desa
8.	Handil Terusan	36,50	2,03	Desa
Jumlah		1.798,80	100,0	

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Anggana

Sasaran utama pembangunan nasional secara umum, dan Kecamatan Anggana secara khusus adalah menyangkut kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dicanangkan dalam setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, data mengenai kependudukan sangatlah diperlukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Penduduk Kecamatan Anggana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 38.128 orang yang terdiri dari 19.764 laki-laki (51,83%) dan 18.364 perempuan (48,16%) yang tersebar di 8 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi kependudukan yang ada pada desa yang bersangkutan. Secara umum persebaran penduduk di Kecamatan Anggana dapat dikatakan cukup merata di setiap desa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sungai Meriam yang merupakan ibukota



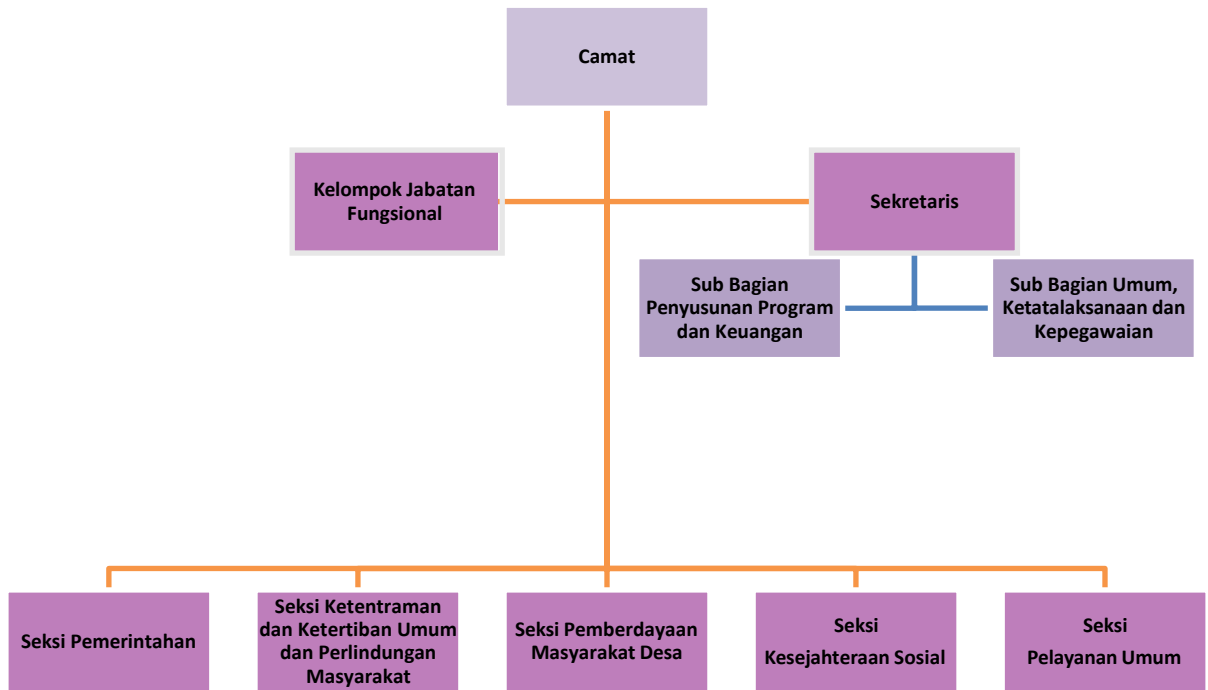
kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 12.121 orang (32%), sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Tani Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 2.107 orang (6%). Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Anggana per desa yaitu:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Anggana Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sepatin	1.567	1.373	2.940
2. Muara Pantuan	1.599	1.429	3.028
3. Tani Baru	1.210	1.338	2.548
4. Kutai Lama	1.881	1.813	3.694
5. Anggana	2.244	2.082	4.326
6. Sungai Meriam	6.486	5.635	12.121
7. Sidomulyo	2.094	2.083	4.177
8. Handil Terusan	2.683	2.611	5.294
Anggana	19.764	18.364	38.128

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara





Pembentukan Kecamatan Anggana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas pokok dari Perangkat Daerah Kecamatan Anggana yaitu :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan



tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Anggana yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
- Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta LembagaKemasyarakatan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Anggana per 31 Desember 2025 sebanyak 33 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:



1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTP	0	-	0	0%
2	SMA	7	4	11	33%
3	SMEA	0	-	0	0%
4	DIPLOMA III	1	1	2	6%
5	S1	7	9	16	49%
6	S2	3	1	4	12%
Jumlah		18	15	33	100%

2) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	-	0	0%
2	II	7	4	11	33%
3	III	9	10	19	58%
4	IV	2	1	3	9%
Jumlah		18	15	33	100%



F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana pada Tahun 2025 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Anggana mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **45.584.375.395,-** yang diperuntukkan belanja mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program dan kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Anggana dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance



and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Anggana pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Anggana. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Anggana adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Anggana dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anggana merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Anggana yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Anggana adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Anggana Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Anggana Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Peningkatan konektivitas antar wilayah di Kecamatan	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah dan aksesibilitas pelayanan publik	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur Kelurahan yang merata dan berkualitas
		Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur Kelurahan yang merata dan berkualitas	Pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan OPD terkait dan/atau pihak swasta

		Pelaksanaan urusan-urusan penunjang pemerintah daerah	Pengembangan smart governance dan peningkatan profesionalisme SDM ASN	Pelaksanaan seluruh urusan operasional Kantor
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur Kelurahan yang merata dan berkualitas	Melalui Musrenbang Kelurahan/Kecamatan untuk menampung usulan-usulan masyarakat terhadap kebutuhan akan sarana prasarana dan upaya pemberdayaan masyarakat kelurahan
		Pelaksanaann Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur Kelurahan yang merata dan berkualitas	Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat di kelurahan untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kelurahan
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan	Kecamatan sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan
4	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan nilai-nilai keagamaan serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini	Sinergitas dengan TNI dan Polri serta tokoh agama dan masyarakat dalam kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Sinergitas dengan TNI dan Polri serta OPD Pengampu dalam penerapan dan penegakan peraturan-peraturan daerah dan kepala daerah
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional



Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Kabupten Kutai Kartanegara untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan. sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50
2	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase pelayanan, Pelaporan dan tindak lanjut Hasil Forum Konsultasi publik	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,3 (Baik)
4	Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas Audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai SPIP Maturitas pada Perangkat Daerah	Level	3
6	Meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pekan inovasi daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut pengaduan SPAN Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SPAN Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Persentase keterinputan data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji "GEMA" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

Berikut Capaian Kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2025 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2025 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Anggana tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	50	50

Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, Kecamatan Anggana melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 45.584.375.395,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Menurun sebesar **Rp.43.733.412.036,-**. Selanjutnya dapat kita lihat rincian penambahan alokasi anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Anggana Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 45.584.375.395	Rp. 43.733.412.036	Rp. 1.850.963.359

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Anggana Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta diuraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Anggana dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

- Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja Tujuan Renstra Kecamatan Anggana pada semester 2 tahun 2025 yaitu sebesar **89,45**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	A (88,30)	A (89,45)	101%	Tinggi	Realisasi dibagi dengan Target	Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang sudah ditetapkan dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Anggana terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Laporan IKM semester II Kantor Camat Anggana, 2025

- **Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)**

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Desember Tahun 2025 (1 Tahun) terhadap seluruh bidang Pelayanan dan dilaporkan sebanyak 2 kali setahun (per semester). Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Anggana pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Waktu Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Persyaratan Pelayanan
4. Produk Pelayanan
5. Kompetensi Petugas
6. Perilaku petugas Pelayanan
7. Kualitas Sarana dan Prasarana
8. Biaya
9. Pengaduan

Tabel 3.3
Analisa Hasil Survey

No	Unsur Pelayanan	Indeks & Mutu Pelayanan
1.	Waktu Pelayanan	85,740
2	Prosedur Pelayanan	85,890
3	Persyaratan Pelayanan	87,060
4	Produk Pelayanan	88,090
5	Kompetensi Petugas	88,260
6	Perilaku petugas Pelayanan	88,990
7	Kualitas Sarana dan Prasarana	90,580
8	Biaya	94,990
9	Pengaduan	95,520
Indeks Pelayanan		89,458
Mutu Pelayanan		A
Kinerja Unit Pelayanan		101%

Sumber : Laporan SKM Semester II Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” pada semester 2 tahun 2025 memperoleh nilai **89,45** dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **101%**, sehingga target kinerja **tercapai**. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Anggana terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat

1. Indikator Kinerja Utama (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-1” tahun 2025 yaitu 100% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani dengan adanya penambahan perangkat dari Instansi terkait sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Anggana yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2025

2. Indikator Kinerja Utama (Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-2” tahun 2025 yaitu 70% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2025 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi beberapa kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik ini dikarenakan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Adapun kendala yang cukup mengganggu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.

3. Indikator Kinerja Utama (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada di wilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2025 yaitu sebesar 50 dan untuk realisasinya pada indikator ini sebesar **10,42%** dengan predikat **Rendah**. Faktor pendukung dari indikator ini adalah sudah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Anggana, tetapi hasil yang diperoleh dari perhitungan pertumbuhan asli desa yang ada pada 8 desa di wilayah Kecamatan Anggana terjadi penurunan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa di Tahun 2025. Ada beberapa faktor penghambat yang mungkin menjadi kendala sehingga belum tercapainya target yaitu masih

lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Pencapaian target kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.4
Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Anggana Hingga Tahun 2025

No.	Desa	Jumlah Pendapatan Asli Desa			Ket
			2024	2025	
1	Sungai Meriam		161.293.800	65.886.000	
2	Anggana		18.178.590	18.470.000	
3	Sidomulyo		0	0	
4	Kutai Lama		0	n.a	
5	Handil Terusan		0	4.950.000	
6	Sepatin		0	60.000.000	
7	Muara Pantuan		0	n.a	
8	Tani Baru		0	20.813.000	
Jumlah PAD			179.472.390	170.119.000	

Sumber : Kecamatan Anggana, 2025

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa yang ada di wilayah Kecamatan Anggana untuk tahun hingga 2025 yaitu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100 \\
 &= \frac{(Rp. 170.119.000 - Rp. 179.472.390)}{Rp. 179.472.390} \times 100 \\
 &= -0,0521 \times 100 \\
 &= 5,21
 \end{aligned}$$

Adapun capaian kinerja untuk indikator rata-rata pertumbuhan pendapatan asli desa yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \\
 &= \frac{5,21}{50} \times 100 \\
 &= 10,42
 \end{aligned}$$

4. Indikator Kinerja Tambahan (menyelesaikan Tindak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI)

Indikator kinerja tambahan ke 4 yaitu Tindak Lanjut Hasil Temuan administrasi dan kerugian BPK atas audit LKPD 5 Tahun Terakhir. Untuk tahun 2025 Kecamatan Anggana telah menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPD seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

5. Indikator Kinerja Tambahan (Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah)

Indikator kinerja tambahan ke-5 yaitu Nilai Maturitas Perangkat Daerah mendukung Nilai Maturitas Kabupaten dengan nilai 3 Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 pada kantor camat Anggana seluruhnya terlaksana dan persentase realisasi 3,83 untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh kantor camat Anggana sebesar **127 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

6. Indikator Kinerja Tambahan (Peningkatan prestasi inovasi)

Indikator kinerja tambahan ke- 6 yaitu Peningkatan Prestasi inovasi di kecamatan Anggana, target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 Kegiatan. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

7. Indikator Kinerja Tambahan (Persentase Tindak Lanjut SPAN Lapor)

Indikator kinerja tambahan ke-7 yaitu Persentase Tindak Lanjut SPAN Lapor di kecamatan Anggana, Diperoleh sebesar 86% dari target 100% atau dengan kata lain tidak ada pengaduan yang ditindak lanjuti kegiatan secara berkala, jadi untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja **Tinggi**

8. Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia)

Indikator kinerja tambahan ke-8 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kecamatan sebesar 100 % sudah tersedianya dan terlaksananya penyelenggaraan satu data Indonesia Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

9. Indikator Kinerja Tambahan (Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji “GEMA” di Perangkat Daerah Indikator kinerja tambahan ke-9 yaitu Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji “GEMA” di Perangkat Daerah sebesar 48 Laporan sudah terlaksananya Gerakan Etam Mengaji “GEMA” di Perangkat Daerah Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasikinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

10.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja)

Indikator kinerja tambahan ke-10 yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dengan Target Nilai 77 Tahun 2025 berdasarkan LHE AKIP . Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar Nilai 66,71 atau 86,63% dengan predikat **Tinggi**

11.Indikator Kinerja Tambahan (Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang efektif, efesien, akuntabel, bersih dan melayani)

Indikator kinerja tambahan ke- 11 yaitu Indeks reformasi birokrasi dengan target nilai 65. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi sebesar 71,51 atau 110% dengan predikat **Sangat Tinggi**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Anggana yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Anggana tahun 2025 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar **89,45**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) dengan nilai indeks kepuasan sebesar **93,36**. Terjadi koreksi realisasi sesuai penilaian Bagian ORTAL Kabupaten. Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar **116%**. Ini terjadi peningkatan perolehan capaian kinerja sebesar **11%**. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Anggana yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Anggana terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi yaitu hilangnya jaringan komunikasi dan internet yang ada serta adanya pemadaman listrik yang cukup sering terjadi akibat dari faktor alam seperti hujan dan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Anggana mengakibatkan jaringan listrik ada yang putus akibat tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2021	70	86	Meningkat	122%	Meningkat
				2022	70	87	Meningkat	124%	Meningkat
				2023	70	91,18	Meningkat	130%	Meningkat
				2024	80	93,36	Meningkat	116%	Meningkat
				2025	88,03	89,45	Meningkat	101%	Meningkat

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2025

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Anggana tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Anggana pada tahun 2025 ini dan ada juga 8 (delapan) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
A Indikator Kinerja Utama										
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	100	100	116%	Tetap
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	100%	70	70	100%	Tetap
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	15	30%	50	5,21	10,42%	Menurun
B Indikator Kinerja Tambahan										
1	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap

2	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
3	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP		Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
4	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
5	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	0	0	0	0	0	0	Tetap
7	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP		Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD		Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
9	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah		Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
10	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik		Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	100	0	0	Menurun
11	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
13	Penerapan Core Values ASN Berakhlak		Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100	100	100	100	-
14	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana		Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100	100	100	100	-



15	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	97,27	138	0	0	0	-
16	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
17	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
18	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
19	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
20	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
21	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
22	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75	100	0	0	0	-
23	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100	0	0	0	-
24	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100	0	0	0	



25	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	14,56	96	0	0	0	-
26	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100	0	0	0	-
27	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	1,5-3,5	0	0	0	0	0	-
28	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40	100	0	0	0	-
29	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3.115	100	0	0	0	-
30	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,9	90,27	77	66,71	86	Menurun
31	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,9	65	71,51	110	Tetap
32	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	84,6	0	0	0	-
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	0	0	0	8,95	4,35	48,60	Tetap
34	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona hijau	Zona Hijau	100	0	0	0	-
35	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok	Persen	100	100	100	0	0	0	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



			atau mempromosikan produk tembakau								
36	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	80	93,36	116	88,3	89,45	101	Menurun
38	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap
40	Meningkatnya penyelenggaraan satu data Indonesia		Persentase keterinputan data pada Satu Data Indonesia	Persen	0	0	0	100	100	100	
41	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji "GEMA" di Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	0	0	0	48	48	100	

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2025

Dari tabel realisasi kinerja diatas dapat kita lihat perbandingan pencapaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 baik itu indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja Kecamatan Anggana sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Kecamatan Anggana (Renstra PD) adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

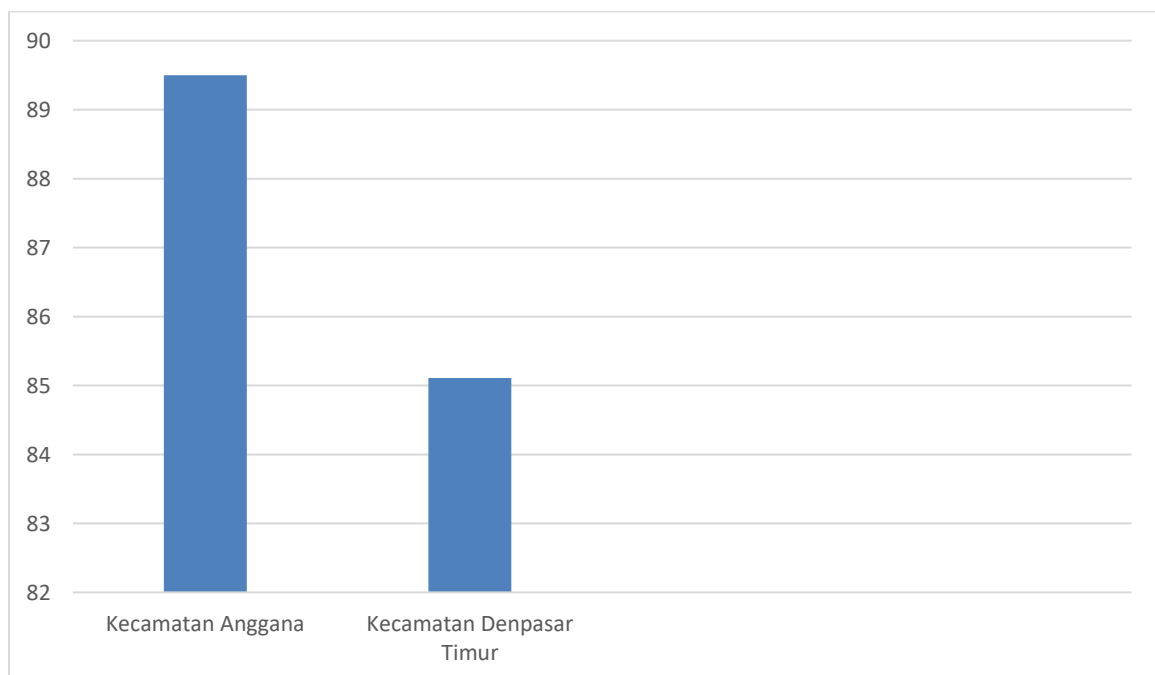
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
A Indikator Kinerja Utama								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan		Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	100%	Sangat Tinggi
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	5,2	10,42%	Rendah

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat capaian realisasi kinerja Kecamatan Anggana terhadap target akhir rencana strategis (renstra) tahun 2026 secara keseluruhan mendapat rata-rata kriteria penilaian sangat tinggi, walaupun ada beberapa indikator yang masih sangat rendah kriteria penilaiannya.

(Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Realisasi target kinerja **Tujuan** Kecamatan Anggana pada semester 2 tahun 2025 yaitu sebesar **89,45**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Baik**, hasil ini tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Anggana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Tahun 2025 yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2025 yaitu Kecamatan Denpasar Timur kota Denpasar memperoleh nilai IKM sebesar **85,11** dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.8





5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2025 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini

:

Tabel 3.9
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
A Indikator Kinerja Utama								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan keamanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait.	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten.
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	100%	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri.	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	5,2	10,42%	Sudah Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Anggana	Masih lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal



B Indikator Kinerja Tambahan								
2	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase pelayanan, Pelaporan dan tindak lanjut Hasil Forum Konsultasi publik	Jumlah	1	0	0%		Tindak lanjut tidak memahami pedoman sehingga laporan belum disusun
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,3	89,46	101%		Tidak Ada
4	Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas Audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100%		Tidak Ada
5	Maturitas sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai SPIP Maturitas pada Perangkat Daerah	Level	3	3,83	128%		Tidak ada



6	Meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pekan inovasi daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%		Tidak ada
7	Tindak Lanjut pengaduan SPAN Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SPAN Lapor	Persen	100	86,60	86%		Tidak Ada
8	Meningkatnya penyelenggaraa n satu data Indonesia	Persentase keterinputan data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%		Tidak Ada
9	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji "GEMA" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	48	48	100%		Tidak Ada



10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,59	85%		Tidak Ada
11	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	75,51	110%		Tidak Ada

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Anggana tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rincian efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	16,30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.039.476.533	5.740.445.785	81,54	Efisien
2		17,91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.932.717.180	32.185.014.306	89,57	Efisien

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
3		15,34	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	503.659.703,00	386.431.080,00	76,72	Efisien
4		4,19	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.974.420	18.435.000	20,95	Efisien
5		10,58	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	169.584.200	89.776.000	52,94	Efisien

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Analisis Program /Kegiatan pencapaian pernyataan kinerja 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100%	SOP Tersedia	Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	81,3	81,3	100%	Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki	Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100%	Tingkat Antusias Warga Yang Cukup Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Instansi Terkait
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	100	100	100%	Rata-Rata Realisasi Serapan Anggaran DD dan ADD Seluruh Desa Di Wilayah Kecamatan Anggana Diatas 70% Sehingga Predikat Kategori Baik	Tidak Ada
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	59,01	62,7%	Data Realisasi dan Pendukung Yang Dibutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia	Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak Dapat Dipenuhi
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100%	Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena koordinasi yang terjalin dengan baik	Tidak Ada
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal	Tidak Ada

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ada pada Kecamatan Anggana dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **87,85%**, dari pagu sebesar Rp.43.733.412.036,- dan terealisasi sebesar Rp.38.420.102.17,-. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 realisasi anggaran sebesar Rp.60.706.218.505,- yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp.16.972.806.469,-. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Kecamatan Anggana

Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Anggana		Rp43.733.412.036,00	Rp38.420.102.171,00	87,85	Rp5.313.309.865,00
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.039.476.533,00	Rp5.740.445.785,00	81,55	Rp1.299.030.748,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp294.307.900,00	Rp170.562.099,00	57,95	Rp123.745.801,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp57.561.400,00	Rp37.025.580,00	64,32	Rp20.535.820,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.500.000,00	Rp0,00	0,00	Rp2.500.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2.590.000,00	Rp1.540.000,00	59,46	Rp1.050.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp30.025.000,00	Rp24.801.519,00	82,60	Rp5.223.481,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp29.020.000,00	Rp25.335.000,00	87,30	Rp3.685.000,00
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Rp163.118.500,00	Rp78.260.000,00	47,98	Rp84.858.500,00
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp9.493.000,00	Rp3.600.000,00	37,92	Rp5.893.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.162.314.681,00	Rp4.630.377.459,00	89,70	Rp531.937.222,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.038.574.181,00	Rp4.525.657.459,00	89,82	Rp512.916.722,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp9.936.500,00	Rp0,00	0,00	Rp9.936.500,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp102.312.000,00	Rp101.640.000,00	99,34	Rp672.000,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp11.492.000,00	Rp3.080.000,00	26,80	Rp8.412.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp121.685.000,00	Rp40.310.000,00	33,13	Rp81.375.000,00
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp12.207.000,00	Rp2.480.000,00	20,32	Rp9.727.000,00
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp55.700.000,00	Rp3.750.000,00	6,73	Rp51.950.000,00



Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp23.928.000,00	Rp14.880.000,00	62,19	Rp9.048.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp29.850.000,00	Rp19.200.000,00	64,32	Rp10.650.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp42.315.700,00	Rp39.627.000,00	93,65	Rp2.688.700,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp42.315.700,00	Rp39.627.000,00	93,65	Rp2.688.700,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp252.785.871,00	Rp236.067.910,00	93,39	Rp16.717.961,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp56.701.054,00	Rp48.858.809,00	86,17	Rp7.842.245,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp31.087.880,00	Rp30.882.800,00	99,34	Rp205.080,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.500.000,00	Rp1.748.300,00	69,93	Rp751.700,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp152.896.937,00	Rp148.638.000,00	97,21	Rp4.258.937,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp9.600.000,00	Rp5.940.001,00	61,88	Rp3.659.999,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp468.926.200,00	Rp107.071.583,00	22,83	Rp361.854.617,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp12.404.000,00	Rp11.511.683,00	92,81	Rp892.317,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp11.892.400,00	Rp11.588.400,00	97,44	Rp304.000,00
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp444.629.800,00	Rp83.971.500,00	18,89	Rp360.658.300,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp612.279.581,00	Rp486.012.075,00	79,38	Rp126.267.506,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp426.146.566,00	Rp306.441.642,00	71,91	Rp119.704.924,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp186.133.015,00	Rp179.570.433,00	96,47	Rp6.562.582,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp84.861.600,00	Rp30.417.659,00	35,84	Rp54.443.941,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp35.189.200,00	Rp30.417.659,00	86,44	Rp4.771.541,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.672.400,00	Rp0,00	0,00	Rp49.672.400,00
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp35.932.717.180,00	Rp32.185.014.306,00	89,57	Rp3.747.702.874,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp323.902.180,00	Rp221.242.350,00	68,31	Rp102.659.830,00



Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp110.346.680,00	Rp93.220.400,00	84,48	Rp17.126.280,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp213.555.500,00	Rp128.021.950,00	59,95	Rp85.533.550,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp66.449.400,00	Rp27.889.800,00	41,97	Rp38.559.600,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp35.542.365.600,00	Rp31.935.882.156,00	89,85	Rp3.606.483.444,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp682.560.600,00	Rp367.862.252,00	53,89	Rp314.698.348,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp34.859.805.000,00	Rp31.568.019.904,00	90,56	Rp3.291.785.096,00
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp503.659.703,00	Rp386.431.080,00	76,72	Rp117.228.623,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp120.151.103,00	Rp71.694.400,00	59,67	Rp48.456.703,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp98.348.023,00	Rp71.694.400,00	72,90	Rp26.653.623,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp21.803.080,00	Rp0,00	0,00	Rp21.803.080,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp383.508.600,00	Rp314.736.680,00	82,07	Rp68.771.920,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp383.508.600,00	Rp314.736.680,00	82,07	Rp68.771.920,00
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp87.974.420,00	Rp18.435.000,00	20,95	Rp69.539.420,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp87.974.420,00	Rp18.435.000,00	20,95	Rp69.539.420,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp87.974.420,00	Rp18.435.000,00	20,95	Rp69.539.420,00
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp169.584.200,00	Rp89.776.000,00	52,94	Rp79.808.200,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp169.584.200,00	Rp89.776.000,00	52,94	Rp79.808.200,00



Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp168.995.800,00	Rp89.776.000,00	53,12	Rp79.219.800,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp588.400,00	Rp0,00	0,00	Rp588.400,00



sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Anggana 97,27 %. Adapun realisasi anggaran 2024 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Anggana

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.500.000	212.639.729	93,46%	14.860.271
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	8.074.791	92,14%	1.925.209
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	3.080.000	30,80%	6.920.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	64.730.210	86,30%	10.269.790
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.342.849	4.358.744.495	88,29%	577.598.354



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	4.520.000	45,20%	5.480.000
Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	- Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	395.000.000	346.865.500	87,81%	48.134.500
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	395.000.000	346.865.500	87,81%	48.134.500
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000	24.895.000	99,58%	141.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.000.000	322.006.500	87,00%	47.993.500
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	- Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu DataKukar	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169.000.029	155.226.000	91,84%	13.774.029
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169.000.029	155.226.000	91,84%	13.774.029
		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	49.000.029	42.226.000	86,17%	6.774.029
		Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	120.000.000	113.000.000	94,16%	7.000.000
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.414.282.475	5.740.913.997	89,50%	673.368.478
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	- Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	227.500.000	212.639.729	93,46%	14.860.271



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	- Pengamanan Bidang Tanah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	8.074.791	92,14%	1.925.209
	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	3.080.000	30,80%	6.920.000
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	64.730.210	86,30%	10.269.790
	- Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.023.492.524	4.439.584.495	88,37%	583.908.029
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.936.342.849	4.358.744.495	88,29%	577.598.354
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	4.520.000	45,20%	5.480.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	77.149.675	76.320.000	98,92%	829.675
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.600.000	37.790.000	97,90%	810.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.190.000	83,80%	810.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000	33.600.000	100%	0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.986.937	265.720.500	97,33%	7.266.437
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	44.675.000	89,35%	5.325.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.953.000	99,90%	47.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	3.883.500	77,67%	1.116.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.986.937	152.870.000	99,92%	116.937
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	14.339.000	95,59%	661.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.703.014	560.432.327	93,92%	36.360.687
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.160.000	371.183.131	91,61%	33.976.869
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.543.014	189.159.196	98,75%	2.383.818
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	148.951.945	93,09%	11.048.055
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	41.173.845	82,34%	8.826.155
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	107.778.100	97,98%	2.221.900
		Jumlah	60.706.218.505	59.052.375.299	97,27%	1.653.843.206

Sumber : Kantor Camat Anggana, 2025.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana tahun 2025 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Anggana pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Anggana Tahun 2021-2026. Kecamatan Anggana telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Anggana Tahun 2025 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 100% (Sangat Tinggi)

2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 100% (Sangat Tinggi).
- b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 10,42% (Rendah).

3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan

1. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP sebesar 100% (Sangat Tinggi)
2. Capaian Kinerja Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebesar 100% (Sangat Tinggi)

3. Capaian kinerja Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 0% (sangat Rendah)
4. Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti sebesar 100% (Sangat Tinggi)
5. Capaian kinerja Laporan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
6. Capaian Kinerja Laporan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 84,3 % (Tinggi)
7. Capaian Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
8. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 86% (Sangat Tinggi)
9. Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 86,61% (Baik)
10. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 128% (Sangat tinggi)
11. Capaian Indeks Pelayanan publik pemerintah Daerah sebesar 4,39 (Tinggi)
12. Capaian kinerja IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) di Kecamatan Anggana sebesar 101% (Sangat Tinggi)
13. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 60 – 80 / BUTUH PERBAIKAN (Cukup)
14. Capaian Pelaksanaan GEMA Perangkat Daerah sebesar 100% (Tinggi)

Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2025 pun menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Anggana sebesar 97,27% menurun menjadi 87,85 % atau terjadi penurunan realisasi sebesar 9,42%



B. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Anggana akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian evaluasi SAKIP Kecamatan Anggana banyak mengalami kendala dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kinerja yang berhubungan dengan SAKIP. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Anggana dalam menyusun SAKIP (IKU dan IKI) karena kurangnya sumber daya manusia, dalam bidang kearsipan tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Anggana Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.



Camat Anggana

RENDRA ABADI, S.STP.,M.Adm.KP

Pembina Tingkat I

NIP 198409222003121001



LAMPIRAN

LAMPIRAN



